




PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF MSMEs IN MANGGARAI REGENCY

Hilde Septine Jerubu¹, Maria Indriyani Hewe Tiwu², Novi Theresia Kiak³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang (85225)

* Corresponding Author: jerubuhilde@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Articles History: Accepted tgl. 11/06/2025 Repaired tgl. 22/06/2025 Approved tgl. 25/06/2025 Available online tgl. 25/06/2025</p> <p>ISSN-E: 2962-4746 ISSN-P: 2961-8312</p>	<p><i>This study aims to analyze the partnership between the government and the private sector in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Manggarai Regency. The approach used is descriptive qualitative, with data analysis techniques based on the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Informants consist of representatives from local government agencies (BAPPEDA and the Department of Cooperatives, MSMEs, and Trade), financial institutions (Bank BRI), and MSME actors. The results show that the established partnership has helped improve access to capital, business training, and managerial assistance for MSMEs. Supporting factors for the partnership include pro-MSME government policies, active roles from the private sector, and synergy in empowerment programs. However, there are also obstacles such as complex bureaucracy, limited information, and a lack of financial literacy among MSME actors. This study recommends strategies to strengthen cross-sectoral coordination, simplify administrative procedures, and improve the human resource capacity of MSMEs in order to make the partnership more effective and sustainable.</i></p>
<p>DOI: 10.58290/jmbo.v4i1.418</p>	<p>Keywords: <i>Partnership, Government, Private Sector, MSMEs, Development</i></p>
<p> ©2025. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)</p>	

PENDAHULUAN pertumbuhan ekonomi di berbagai
 Pemberdayaan UMKM telah menjadi negara. Negara-negara maju seperti
 agenda utama dalam strategi Jepang, Korea Selatan, dan Jerman telah

mengembangkan kebijakan khusus untuk mendorong UMKM agar lebih inovatif dan berdaya saing tinggi. (Michael E. Porter, 1990) dalam *The Competitive Advantage of Nations*, daya saing UMKM tidak hanya bergantung pada kebijakan domestik, tetapi juga pada kemampuannya untuk terhubung dengan pasar global melalui integrasi rantai pasok dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan UMKM harus berorientasi pada peningkatan nilai tambah, akses pembiayaan, serta penguatan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, (Joseph E. Stiglitz dan Bruce C. Greenwald, 2014) menekankan pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran dan inovasi di sektor UMKM. Mereka berpendapat bahwa kebijakan yang efektif dalam mendukung UMKM harus mampu meningkatkan kapasitas inovasi dan daya saing melalui pelatihan, riset, serta akses terhadap teknologi modern, sehingga UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan bersaing di tingkat global.

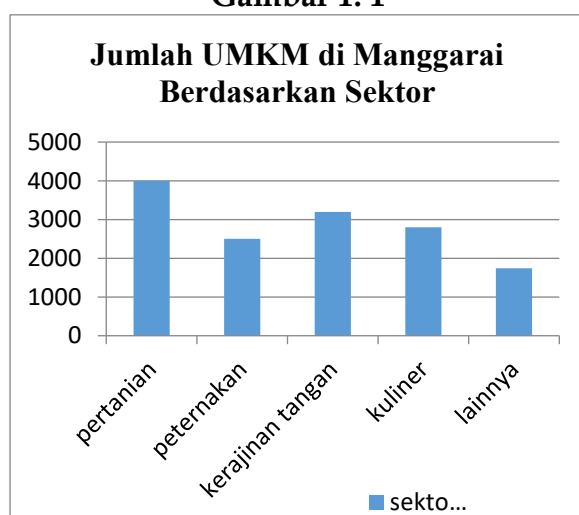
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Menurut (Tambunan, 2019) dalam bukunya *UMKM di Indonesia: Isu-isu Penting*, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat. Selain itu, (Bank Dunia, n.d.) menyatakan bahwa UMKM merupakan

tulang punggung ekonomi di banyak negara berkembang karena mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM adalah sektor usaha yang memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Selain itu, UMKM mendorong inovasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada sektor besar.

Tingkat daerah, UMKM juga memiliki peran strategis, termasuk di Kabupaten Manggarai. (Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur, 2021) jumlah UMKM di Kabupaten Manggarai mencapai 14.245 unit. UMKM di daerah ini berkembang dalam berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, kerajinan tangan, dan kuliner. Meskipun jumlahnya besar, banyak UMKM masih menghadapi kendala dalam mengembangkan usaha mereka, terutama dalam hal akses permodalan, literasi digital, dan pemasaran produk. Menurut Suparman (2021) dalam jurnalnya *Strategi Pemberdayaan UMKM*, terdapat delapan aspek utama yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan UMKM, yaitu: Informasi usaha, Kemitraan, Perizinan usaha, Pendanaan, Sarana dan prasarana, Kesempatan berusaha, Promosi dagang, dan Dukungan kelembagaan. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan harus memastikan bahwa setiap aspek ini mendapat perhatian yang cukup agar

UMKM dapat berkembang secara optimal. Misalnya, aspek informasi usaha sangat penting agar pelaku UMKM dapat memahami peluang pasar, sementara aspek perizinan usaha harus dipermudah agar tidak menjadi hambatan administratif bagi usaha kecil. Dengan memperhatikan delapan aspek ini, diharapkan UMKM dapat lebih mandiri, inovatif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan global.

Gambar 1. 1



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2021

(Kementerian Koperasi dan UKM, 2023), pemerintah telah membentuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan pendampingan serta akses terhadap permodalan dan pelatihan usaha. Selain itu, kebijakan lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program bantuan langsung bagi UMKM, serta peningkatan akses pasar melalui digitalisasi menjadi langkah konkret dalam memperkuat UMKM. (Yusuf, 2022), Kebijakan

Pemberdayaan UMKM di Indonesia, keberhasilan UMKM sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan tersebut serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi UMKM di daerah.

Berbagai sektor turut berperan dalam pemberdayaan UMKM selain pemerintah. (Kadir, M. R., 2022) dalam risetnya tentang Sinergi Pihak Swasta dan UMKM, sektor swasta, seperti perusahaan besar dan perbankan, dapat membantu UMKM dalam hal permodalan, teknologi, dan akses pasar. BUMN dan BUMD juga berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan skema kemitraan bisnis. Kadin (Kamar Dagang dan Industri) berperan dalam membangun jejaring usaha dan memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM. Selain itu, LSM serta lembaga keuangan berbasis komunitas turut serta dalam memberikan pendampingan usaha dan edukasi keuangan kepada UMKM. Sinergi antara sektor-sektor ini sangat diperlukan agar pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Salah satu solusi yang mulai diterapkan dalam pengembangan UMKM adalah kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership/PPP*). Konsep ini melibatkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung UMKM dalam aspek pembiayaan, teknologi, dan pemasaran. Kementerian Koperasi dan UKM (2022) menegaskan bahwa kemitraan ini

penting untuk mempercepat pertumbuhan UMKM dan meningkatkan daya saing mereka. OECD (2020) juga menjelaskan bahwa sektor swasta dapat membantu UMKM dengan menyediakan investasi, teknologi, dan akses pasar yang lebih luas.

Menurut (Tambunan, 2019), kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta telah terbukti efektif dalam mendukung pengembangan UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, di Jawa Barat, program kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan besar seperti PT Indofood telah membantu UMKM sektor pangan dalam peningkatan kapasitas produksi dan sertifikasi halal, yang memperluas akses pasar mereka. Selain itu, penelitian oleh (Kuncoro, 2020) menunjukkan bahwa di Yogyakarta, kerja sama antara pemerintah dan lembaga keuangan mikro telah memberikan pendanaan yang lebih mudah diakses bagi UMKM kreatif, sehingga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal. Upaya kemitraan ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan swasta dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Konsep kemitraan publik-swasta juga mulai diterapkan di Kabupaten Manggarai. Salah satu program yang telah berjalan adalah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Bank NTT melalui program Kredit Mikro bagi UMKM. Program ini bertujuan memberikan akses permodalan

dengan bunga rendah bagi pelaku usaha kecil. Namun, menurut (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 2024) banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan jaminan kredit. Selain itu, ada juga inisiatif kerja sama dengan koperasi lokal dan perusahaan swasta untuk menyediakan pendampingan usaha dan pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kemitraan publik-swasta berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Manggarai. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan kemitraan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan sektor swasta dalam meningkatkan efektivitas kemitraan untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Kabupaten Manggarai.

LANDASAN TEORI

1. Teori Endogenous Development

Teori *Endogenous Development*, yang dikembangkan oleh (Stohr, 1981) menekankan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus bertumpu pada potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak utama. Pendekatan ini menolak ketergantungan berlebihan pada investasi eksternal dan lebih menitikberatkan pada pemanfaatan

sumber daya lokal, inovasi berbasis komunitas, serta penguatan kapasitas pelaku ekonomi setempat, termasuk Usaha Mikro. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya inovasi berbasis komunitas dalam menciptakan daya saing yang berkelanjutan. UMKM yang berkembang dengan model ini biasanya memiliki karakteristik yang kuat dalam menyesuaikan diri dengan kondisi pasar lokal.

2. Teori Pembangunan Ekonomi menurut Todaro

Pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan perubahan struktural yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, distribusi kebutuhan dasar, dan perluasan pilihan ekonomi serta sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan distribusi pendapatan secara lebih merata. (Todaro, Michael P. & Smith, 2020), UMKM lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi setempat dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dibandingkan dengan perusahaan besar yang lebih berorientasi pada teknologi dan kapital.

3. Hubungan UMKM dengan Pembangunan Daerah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. UMKM berfungsi sebagai pilar utama dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan struktur ekonomi lokal. Menurut data dari **Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2023)**, sektor UMKM menyumbang sekitar **60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional** dan menyerap lebih dari **97% tenaga kerja** di Indonesia. Kontribusi ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh industri besar.

4. Konsep Kemitraan

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan mencapai manfaat bersama berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Menurut (Tambunan, 2019). kemitraan dalam konteks ekonomi pembangunan dapat berbentuk kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan daya saing serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan

menurut (Kuncoro, 2020) kemitraan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, seperti kemitraan produksi, pemasaran, pembiayaan, dan distribusi, di mana setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi untuk mendukung keberlanjutan usaha.

5. Model Kemitraan

Pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep *hollow state*, dimana dalam bentuk kemitraan konsep ini pekerjaan pemerintah lebih banyak di kontrakkan (*contracting out*) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya akan menangani urusan yang essential saja (Milward, H. Brinton; Provan, 2011).

6. Strategi Kemitraan

Kemitraan menurut perspektif etimologi diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner* bisa diartikan pasangan atau sekutu. Maka *partnership* dapat diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, atau rekan. Kemitraan bisa diartikan perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Strategi kemitraan merupakan strategi kerjasama yang terbentuk oleh karena adanya dimensi kepercayaan dan komitmen antara partner. Kepercayaan dan komitmen ini terbentuk karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya adalah faktor ketergantungan sumberdaya faktor kualitas hubungan

faktor fleksibilitas dan faktor penyebaran informasi (Purba, 2008).

7. Konsep Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Kemitraan antara pemerintah dan swasta merupakan “pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan diatas yang di atur dalam setiap kontrak, antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi diluar sektor publik” (Dwiyanto, 2011) mengartikan bahwa. Dalam definisi yang sederhana dan bersifat umum ini, Bovaird dengan jelas menjelaskan bahwa kemitraan melibatkan bentuk kerjasama yang lebih dari sekedar kontrak yang di sepakati bersama. Ia mengatakan bahwa kemitraan adalah “di atas dan melebihi” setiap kerjasama yang diatur dalam kontrak kerjasama tradisional antara pemerintah dan swasta.

8. Manfaat Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Rasionalitas dari penggunaan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sudah banyak dikemukakan oleh berbagai pihak. Menurut Selsky dan Parker dalam (Dwiyanto, 2011). Logika dari *platform* ini adalah kemitraan sosial akan terjadi jika setiap aktor menyadari perannya masing-masing, namun apabila salah satu di antara mereka gagal melaksanakan perannya maka sektor lainnya dapat menggantikannya. Logika lainnya yaitu masing-masing

platform sebenarnya memiliki kecenderungan untuk bermitra dengan lainnya. Mengenai manfaat kemitraan antara pemerintah dan swasta adalah meningkatnya akuntabilitas pelayanan publik. Selama ini birokrasi pemerintah mengelola pelayanan secara sendirian, akuntabilitas menjadi masalah yang sering dikeluhkan warga pengguna.

9. Peranan dan Kontribusi UMKM

Dewasa ini, UMKM diberi perhatian yang cukup besar dalam perkembangannya di berbagai belahan dunia. Ini merupakan hal yang wajar, mengingat pentingnya peranan UMKM baik dalam bidang sosial, ekonomi, hingga bidang politik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *mixed methods*, Creswell dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa "Mixed Methods Research is an approach to inquiry that combines or associated both qualitative quantitative from of research" Metode kombinasi adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (Pratiwi, 2016). Karena menyajikan hasil penelitian dengan angka-angka untuk melihat bagaimana pengaruh hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara Nilai Tukar Rupiah, BI Rate dan Cadangan Devisa terhadap Inflasi di Indonesia selama Periode 2002-2023. Serta menggunakan deskriptif kuantitatif karena peneliti bertujuan untuk

mendeskripsikan kondisi Kebijakan Moneter Bank Indonesia Terhadap Hubungan jangka panjang dan jangka pendek dari masing-masing variabel untuk memperkuat jawaban dari hasil analisis kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.4.1 Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Manggarai.

1. Faktor pendukung kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Manggarai

Faktor pendukung kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan UMKM meliputi adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung, seperti kemudahan perizinan dan insentif usaha. Pemerintah juga menunjukkan komitmen melalui program pelatihan, pendampingan, dan penyediaan infrastruktur. Sementara itu, pihak swasta berperan melalui program CSR, bantuan teknologi, dan pembukaan akses pasar. Kemitraan ini berjalan baik karena adanya kepentingan bersama, seperti menciptakan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok. Dukungan lain yang penting adalah ketersediaan sumber daya lokal, lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan, serta

pemanfaatan teknologi digital yang memudahkan UMKM berkembang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung utama keberhasilan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Manggarai terletak pada adanya perencanaan yang terintegrasi, dukungan regulasi dan anggaran, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Pemerintah daerah telah menetapkan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas pembangunan dalam RPJMD dan menjalin kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga pelatihan. Di sisi lain, Bank BRI memberikan dukungan nyata melalui akses pembiayaan, edukasi keuangan, serta digitalisasi layanan transaksi. Selain itu, pendampingan yang rutin dan responsif terhadap kebutuhan UMKM turut memperkuat kepercayaan dan efektivitas program yang dijalankan. Sinergi yang harmonis antara pemerintah, swasta, dan pelaku UMKM menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dandan Irawan dengan judul Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK) Dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi

Unggulan Lokal yang menunjukkan hasil bahwa Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung kemitraan dengan memberikan regulasi dan kebijakan yang tepat.

2. Faktor penghambat kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Manggarai

Faktor penghambat kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam mengembangkan UMKM biasanya karena kurangnya koordinasi antara keduanya sehingga program yang dijalankan kurang terintegrasi. Selain itu, aturan yang rumit dan birokrasi membuat pihak swasta sulit untuk ikut serta. Banyak UMKM juga belum siap karena manajemen yang lemah dan kurangnya akses informasi, sehingga swasta kurang percaya untuk bermitra. Keterbatasan dana dan sumber daya dari pemerintah maupun swasta juga menjadi kendala. Selain itu, kurangnya kepercayaan dan perbedaan tujuan antara pemerintah yang fokus pada pemberdayaan dan swasta yang ingin untung, membuat kerja sama sulit berjalan lancar. Data UMKM yang tidak lengkap dan kurangnya evaluasi juga membuat program kemitraan kurang efektif. Semua hal ini menjadi penghambat utama dalam pengembangan UMKM

melalui kemitraan pemerintah dan swasta.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat keberhasilan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Manggarai. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya literasi keuangan dan administrasi di kalangan pelaku UMKM, kesulitan dalam mengakses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta ketidaksesuaian antara program yang ditawarkan dengan kebutuhan riil UMKM di lapangan. Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya daya saing produk UMKM, ketidakkonsistenan kualitas, dan keterbatasan akses ke pasar modern yang masih menjadi hambatan besar dalam pengembangan usaha.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Ghassani dengan judul Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif Tentang Kemitraan PT. PJB (Pembangkit Jawa Bali) Unit Gresik dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik), yang menunjukkan hasil bahwa beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman mengenai program

CSR mempengaruhi keberhasilan implementasinya.

4.4.2 Strategi Untuk Meningkatkan Efektifitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Manggarai

Strategi kemitraan merupakan strategi kerjasama yang terbentuk oleh karena adanya dimensi kepercayaan dan komitmen antara partner. Kepercayaan dan komitmen ini terbentuk karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya adalah faktor ketergantungan sumberdaya faktor kualitas hubungan faktor fleksibilitas dan faktor penyebaran informasi (Purba, 2008). Strategi untuk meningkatkan efektifitas kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi kunci utama keberhasilan. Pemerintah daerah telah mulai mengarahkan pengembangan UMKM melalui kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga keuangan, serta pelaku UMKM lokal. Langkah ini mencerminkan adanya upaya menciptakan ekosistem kemitraan yang lebih terarah dan terintegrasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Partisipasi aktif pelaku UMKM dalam perumusan kebijakan dan program

juga menjadi bagian penting dari strategi kemitraan. Pemerintah daerah tidak hanya membentuk kebijakan dari atas, tetapi juga membuka ruang aspirasi dan melibatkan UMKM dalam proses perencanaan. Pelatihan yang diberikan kepada UMKM tidak bersifat satu kali, melainkan dilanjutkan dengan pendampingan intensif. Hal ini menjadi bentuk konkret dari strategi berkelanjutan yang bertujuan agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam menjalankan usahanya.

Sementara itu, keterlibatan sektor swasta, terutama lembaga keuangan, menjadi elemen penting dalam memperkuat efektivitas kemitraan. Peran swasta tidak terbatas pada pembiayaan, tetapi juga meliputi penguatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses teknologi digital. Sinergi antara pemerintah dan swasta dalam merancang dan melaksanakan program-program terstruktur terbukti mampu menciptakan nilai tambah bagi UMKM.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan software NVivo 12, ditemukan bahwa kata-kata seperti "pelatihan", "program", "pendampingan", dan "swasta" paling sering muncul dalam data wawancara. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan

kapasitas SDM bagi UMKM. Program pelatihan yang relevan dan rutin harus menjadi prioritas dalam strategi kemitraan, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti digitalisasi dan daya saing pasar. Selain itu, pendampingan pascapelatihan menjadi aspek krusial agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Program-program terstruktur yang lahir dari kemitraan juga perlu dirancang agar bersifat jangka panjang dan mampu menjangkau berbagai aspek pengembangan UMKM, termasuk akses pembiayaan, pengembangan produk, serta perluasan pasar.

Dengan demikian, strategi yang mencakup pelatihan berkelanjutan, pendampingan langsung, pembentukan program-program terarah, serta pelibatan aktif sektor swasta diyakini mampu memperkuat efektivitas kemitraan dalam pengembangan UMKM. Pendekatan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi kemandirian ekonomi lokal di Kabupaten Manggarai.

SIMPULAN

Keberhasilan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Manggarai didukung oleh adanya perencanaan yang baik, dukungan

anggaran dan aturan dari pemerintah, serta keterlibatan aktif pihak swasta yang membantu melalui pembiayaan, pelatihan keuangan, dan layanan digital. Pendampingan yang rutin dan pendekatan yang ramah juga membantu UMKM berkembang. Namun, masih ada beberapa hambatan seperti rendahnya pengetahuan UMKM tentang keuangan dan administrasi, sulitnya mengakses program bantuan, program yang tidak sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta kurangnya koordinasi antar pihak. Oleh karena itu, keberhasilan kemitraan ini sangat bergantung pada kerja sama yang solid, program yang sesuai kebutuhan, dan peningkatan kemampuan serta partisipasi dari semua pihak yang terlibat.

Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Kabupaten Manggarai adalah dengan membangun kerja sama yang lebih kuat, rutin, dan berkelanjutan. Strategi ini meliputi penyelenggaraan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti pelatihan digital, manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan, yang kemudian dilanjutkan dengan pendampingan langsung agar UMKM bisa menerapkan ilmu yang didapat. Selain itu, peran aktif swasta, khususnya lembaga keuangan, sangat penting tidak hanya dalam hal pembiayaan, tetapi juga dalam memberikan dukungan teknis dan akses teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizal Kurniawan. (2014). *Perjanjian Kemitraan sebagai Pola Kerjasama* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/13764/2/2.Persyaratan.pdf>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur. (2021). *Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota, 2021*. <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0OCMy/jumlah-perusahaan-industri-mikro-kecil--2022>.
- Bank Dunia. (n.d.). *Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. <https://www.worldbank>
- Boone, L. E., & Kurtz, D. L. (2002). *Contemporary Business*. South-Western College Pub.
- Clapham, R. (1991). *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*. LP3ES.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan T. K. K. M. (2024). *Pelatihan dan pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan kredit*. Pemerintah Kabupaten Manggarai. <https://www.manggaraikab.go.id/dinas-koperasiumkm-dan-naker-launching-pbld-bagi-pengusaha-umkm-di-manggarai/>
- Ditjen P2L & PM. (2004). *Pengertian Kemitraan Secara Umum*. <https://promkes.kemkes.go.id/pub/files/files68278Final> BUKU KEMITRAAN 2019.pdf
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Irianti, A. F. (2011). *Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Pariwisata*. Universitas Brawijaya.

- Joseph E. Stiglitz dan Bruce C. Greenwald. (2014). *Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress*. Columbia University Press.
- Kadir, M. R., & A. K. (2022). Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 4953-Article Text-14355-1-10-20240823 (3).pdf
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *pemerintah telah membentuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan*.
<https://www.kemenkopukm.go.id/>
- Kuncoro, M. (2020). *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Aplikasi*. UPP STIM YKPN.
- Linton Ian. (1997). *Kemitraan: Meraih Keuntungan Bersama*. Jakarta: Halirang.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Michael E. Porter. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.
- Miles, Matthew B.; Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Milward, H. Brinton; Provan, K. G. (2011). *Governing the Hollow State*. 2000, 10, 359-379.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengantar Pendidikan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Purba, E. A. (2008). *ANALISIS PENERAPAN STRATEGI KEMITRAANTERHADAP KINERJA PERUSAHAAN BIRO TEKNIK LISTRIK (Studi Empiris pada Hubungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng-DIY Area Pelayanan dan Jaringan Semarang dengan Perusahaan Biro Teknik Listrik (BTL) Di Wilayah Kerja APJ*.
- Rahmana, A. (2009). *Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*. B11-B15.
<https://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/view/1033>
- Smith, M. P. T. dan S. C. (2015). *Economic Development*. Pearson Education Limited.
- Stohr, W. (1981). *Development from Below: The Bottom-Up Approach in Regional Policy Making*. Pergamon Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. . (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu.
- Sulistiyastuti, D. R. (2004). *Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 143-164.
- Tambunan. (2019). *UMKM di Indonesia: Isu-isu Penting dan Kebijakan*. Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- Todaro, M. P. (2012). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (9 ed.). Erlangga.
- Tugimin. (2004). *Kewarganegaraan*. CV. Grahadi.
- UKM, K. N. K. dan. (2007). *Laporan perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Indonesia tahun 2006*.
- Wilantara, R. F., & Indrawan, R. (2016). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*.

Serambinews.com, 1-217.
Yusuf. (2022). *Peranan Pemerintah Dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah (UMKM).*